

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 34 Provinsi pada saat sekarang. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang di jajah oleh Kolonial karena kekayaan alam yang melimpah dan tempat yang strategis, sehingga Indonesia dijadikan tempat untuk mengembangkan perekonomian negara asing. Pada awal kemerdekaan 1945 Indonesia hanya memiliki delapan Provinsi yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Namun setelah diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia (RI) No.10 tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 Provinsi Sumatera di bagi menjadi tiga Provinsi yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Ibukota Sumatera Utara waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, atau yang sekarang di sebut Banda Aceh. Namun pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam negara Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, maka Provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencangkup tiga keresidenan, yaitu Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Azmi Al Bahij, *Sejarah 34 Provinsi Indonesia*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2013), h. 11

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga dikenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara.<sup>2</sup> Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada September tahun 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung dan kepulauan Bangka Belitung, namun pada saat sekarang keempat wilayah tersebut membentuk wilayah Provinsi tersendiri. Sedangkan Sumatera Tengah adalah suatu Provinsi yang pernah ada di Indonesia dengan Ibukota Bukittinggi. Wilayahnya meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan kepulauan Riau yang sekarang. Namun setelah dibubarkan dengan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 dan Sumatera Tengah dimekarkan menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi lewat Undang-undang No.61 tahun 1958 oleh pemerintahan Soekarno.

Sedangkan Sumatera Barat adalah Provinsi yang ada di Indonesia dengan Ibukota Padang. Padang adalah salah satu kota tua di kawasan pantai barat Sumatera. Dalam buku Ir. H. Walleg S. Jas, M.M dan Windo Wibowo, S.Hum tahun 2012, pada awalnya, yaitu pada abad ke 17, kota Padang di huni oleh nelayan, petani garam dan pedagang. Kala itu, Padang belum begitu penting sebagai pusat perdagangan karena arus perdagangan orang Minang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun, sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 55

bangsa asing, serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat pulau Sumatera.<sup>3</sup>

Kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI yaitu suku Aceh. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman, dan Inderapura yang dikuasai oleh Raja-raja wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas.<sup>4</sup>

Kemudian Belanda datang mengincar Padang, Belanda berhasil menguasai Padang pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan Raja-raja Muda wakil dari Pagaruyung. Sedangkan tahun 1667 Belanda mulai membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi. Pada tahun 1784, Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Padang menjadi ramai setelah adanya pelabuhan Teluk Bayur.<sup>5</sup>

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Provinsi Sumatera kemudian dipecah menjadi tiga, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat merupakan bagian dari keresidenan di dalam provinsi Sumatera Tengah beserta Riau dan Jambi.

<sup>3</sup>Walneg S. Jas, Windo Wibowo, *Padang diPersimpangan Jalan ? Potret Dahulu, Kini dan Visi Masa Depan*, (Jakarta:PT Visi Media Nusantara, 2012), h. 56

<sup>4</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang, 2004

<sup>5</sup>Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), h. 9

Berdasarkan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957, Sumatera Tengah kemudian dimekarkan lagi menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, residen di Sumatera Barat, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri.<sup>6</sup>

Pada awalnya Kota Padang hanya sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh perbukitan. Padang merupakan daerah yang strategis karena memiliki pulau yang menarik, memiliki laut, memiliki letak yang strategis sehingga Padang cepat mengalami perkembangan baik dari segi pemerintahan, ekonomi ataupun yang lainnya.

Diawal tahun 1950-an Kota Padang merupakan salah satu dari 16 Daerah Tingkat yang ada dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Waktu itu Kota Padang mempunyai status Kota Praja di bawah seorang Walikota. Pada tahun 1958 Sumatera Tengah dimekarkan.

Sebelum penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, pada masa Kolonial Belanda Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Bukittinggi. Namun setelah kemerdekaan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dipindahkan ke Padang. Pindahan Ibukota Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang yaitu karena Padang memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Ibukota Provinsi.

Penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu karena pada tahun 1957 Kota Padang dijadikan sebagai pusat kegiatan

---

<sup>6</sup> Azmi Al Bahij, *Op.Cit.*, h. 24

pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, selain itu Padang dianggap memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat.<sup>7</sup>

Dari yang penulis lihat, penulis tertarik dengan penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1979 sampai dengan 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik dan berniat untuk mengkaji lebih lanjut tulisan ini yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **Penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat (1979- 2018) Tinjauan Historis.**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Dari penjelasan di atas agar penulis terarah untuk melakukan penelitian selanjutnya. Maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penulisan ini:

### 1. Rumusan masalah

Agar terarah pembahasannya untuk selanjutnya maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana **Penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat.**

### 2. Batasan Masalah

#### a. Batasan temporal

Untuk lebih memfokuskan penulisan. Penulis membatasi tahun penelitian yaitu pada tahun 1979 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 1979 merupakan tahun ditetapkannya Kota Padang sebagai

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 Tanggal 28 September 1979

Ibukota Provinsi Sumatera Barat secara hukum yang sebelumnya atau tahun 1958 Kota Padang secara *De Facto* dijadikan Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tahun 2018 yaitu tahun batas akhir penelitian yang penulis lakukan.

b. Batasan Tematis

- 1) Bagaimana sejarah Kota Padang ?
- 2) Bagaimana proses penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi ?
- 3) Bagaimana keadaan Kota Padang pada saat pemerintahan walikota pertama setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 2018

c. Batasan Spasial

Tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kota Padang.

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah Kota Padang
- b. Untuk mengetahui proses penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat
- c. Untuk mengetahui Keadaan Kota Padang pada saat pemerintahan walikota pertama setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 2018

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**

- a. Kegunaan dalam melakukan penelitian yaitu akan menambah wawasan penulis sendiri dalam memahami sejarah Kota Padang
- b. Akan menambah wawasan penulis tentang proses pembentukan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat
- c. Akan menambah wawasan penulis tentang Walikota-walikota yang pernah memerintah setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 2018
- d. Kegunaan yang lain yaitu akan menjadi tambahan literatur untuk perpustakaan dan untuk bahan bacaan di pustaka fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

#### D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman antara peneliti dan pembaca dalam memahami pengertian judul maka penulis menjelaskan sebagai berikut:

Penetapan Adalah proses, cara, perbuatan menetapkan<sup>8</sup>

Kota padang :Kota Padang adalah salah satu Kota tertua di kawasan Pantai Barat Sumatera. Menurut sumber sejarah, pada awalnya yakni sebelum abad ke-17

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**

Kota Padang di huni oleh para nelayan, petani garam dan para pedagang. Selain itu Kota Padang adalah Kota terbesar di Pantai Barat Pulau Sumatera sekaligus Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Padang merupakan pintu gerbang Barat Indonesia dari Samudera Hindia. Wilayah

<sup>8</sup> <http://www.artikata.com/arti-pembentukan.html>, diakses Selasa 26 Februari 2019, Pukul 20:46

administratifnya memiliki luas 694,96 km<sup>2</sup> dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168 jiwa.

Ibukota :Tempat kedudukan pusat pemerintah daerah tingkat 1 atau Provinsi.<sup>9</sup>

Provinsi :Adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintah di bawah wilayah negara atau negara bagian.<sup>10</sup>

Sumatera Barat Adalah sebuah Provinsi yang terletak di pesisir Barat Pulau Sumatera; Indonesia dan merupakan Provinsi terluas kesebelas di Indonesia dengan Ibukota Padang.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**

#### E. Tinjauan Pustaka

Bedasarkan penelusuran awal dengan melakukan studi pustaka dan membaca beberapa sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas, dan dari beberapa buku sumber lainnya yang berkaitan. Karya yang telah di baca, penulis menemukan karya ilmiah, laporan penelitian yang ada hubungannya dengan pembahasan yang penulis teliti yaitu:

<sup>9</sup> <http://kbbi.kata.web.id/ibu-kota-provinsi/>, dikses Selasa 26 Februari 2019 Pukul 16:20

<sup>10</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/provinsi>, diakses Selasa 26 Februari 2019, Pukul 21:10

Dalam buku Rusli Amran yang berjudul *Padang Riwayatmu Dulu*. Dalam buku ini membahas tentang Padang tempo dulu yang berisi tentang keadaan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan, tentang bangunan-bangunan yang ada di Kota Padang, pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Kota Padang pada tempo dulu. Namun mengenai penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan Walikota-walikota yang ada di Sumatera Barat tidak ada dalam buku ini.

Dalam buku Freek Colombijn yang berjudul *Paco-Paco (Kota) Padang*. dalam buku ini membahas tentang sejarah sebuah Kota di Indonesia pada abad ke-20 dan penggunaan tata ruang Kota. Selain itu dalam buku ini hanya sedikit yang membahas tentang sejarah Kota Padang.

Dalam buku Mestika Zed yang berjudul *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*.<sup>11</sup> Membahas sedikit tentang Kota Padang dalam tiga zaman yaitu kolonial Belanda, Pendudukan Jepang dan Masa Kemerdekaan.

Dalam buku Azmi Ali Bahiy yang berjudul *Sejarah 34 Provinsi Indonesia*. Dalam buku ini sedikit membahas tentang sejarah Sumatera Barat. Namun penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat tidak dipaparkan dalam buku ini. Selain itu dalam buku ini hanya membahas sejarah Sumatera Barat pada masa lalu dan tidak ada membahas tentang penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Dalam buku Mestika Zed, Dkk yang berjudul *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*. Dalam buku ini

---

<sup>11</sup> Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*, (Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UNP), h. 2

tidak ada membahas tentang penetapan Ibukota Sumatera Barat. Dalam buku ini hanya membahas tentang Indonesia telah mengalami dua zaman penjajahan: Belanda dan Jepang.<sup>12</sup>

Dalam laporan penelitian yang dibuat oleh Gusti Asnan dengan judul *Padang akhir abad XIX dan awal abad XX: Profil Kota Kolonial*. Dalam tulisan ini membahas tentang Padang sebelum abad XX dan Padang pada akhir abad XIX dan Awal abad XX. Yang mana pembahasannya yaitu Padang dan kawasan pesisir Sumatera Barat, Padang sebagai pusat pemerintahan Kolonial.

Dalam buku Fitra Arda dan Gusti Asnan, Balai Pelestarian Cagar Budaya provinsi Sumatera Barat, Riau dan kepulauan Riau dengan judul *Cagar Budaya Dimata Publik*, dalam buku ini membahas tentang Padang Kota lama di ujung senja yang pembahasannya yaitu Padang sebagai Kota terbesar di luar pulau Jawa dan Padang sebagai Kota Metropolitan pada masa itu. Dalam buku ini tidak ada sedikitpun yang membahas tentang penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian penulis nantinya yaitu penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mengungkapkan dan mendapatkan data yang konkrit sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Kota yang penulis teliti.

<sup>12</sup> Mestika Zed, dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*, (Padang: Citra Buana Indonesia, 2002), h. 9

<sup>13</sup> Fitra Arda, Gusti Asnan, *Cagar Budaya di Mata Publik*, (Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau: Balai Pelestarian Cagar Budaya, 2014), h. 137

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode penelitian sejarah. Adapun metodenya yaitu:

### 1. Heuristik

Metode heuristik merupakan tahap pengumpulan data atau sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang di dapati melalui penelitian lapangan ke objek pembahasan melalui wawancara dengan pelaku sejarah, saksi sejarah dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang di dapati melalui buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan yang di bahas.<sup>14</sup>

### 2. Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan sumber, yang di lakukan yaitu kritik sumber. Kritik sumber sejarah merupakan metode untuk menilai sumber-sumber yang kita butuhkan guna mengadakan penulisan sejarah. Dalam kritik sumber ini pada dasarnya merupakan proses penentuan akurasi dan keabsahan sumber sejarah berdasarkan penganalisaan yang mendalam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan keberadaan serta kompetensi sumber sebagai saluran informasi sejarah. Kritik sumber terbagi 2 yaitu: kritik sumber intern dan kritik sumber ekstern. Kritik intern yaitu pengujian kesahihan (reabilitas) isi informasi yang terkandung

---

<sup>14</sup> G.J Reiner, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pejabat Offset, 1997), h. 113

di dalamnya. Sedangkan kritik sumber ekstern yaitu kritik yang dilakukan pada sumber itu sendiri.<sup>15</sup>

### 3. Sintesis

Sintesis yaitu membuat jalinan fakta tersusun dan terkait dalam suatu keseluruhan hingga membentuk rangkaian cerita sejarah yang logis.<sup>16</sup>

### 4. Penulisan

Langkah terakhir dalam penulisan adalah hasil penelitian dengan menganalisis dan memaparkan sumber-sumber hingga di dapatkan fakta-fakta yang tersusun dengan sistematika.

## G. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu berisikan tentang monogram Kota Padang (wilayah, sosial keagamaan, ekonomi dan pendidikan).

Bab ketiga yaitu berisi tentang hasil penelitian yaitu sejarah Kota Padang, proses penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan Walikota-walikota setelah kemerdekaan sampai tahun 2018.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

<sup>15</sup> Mestika Zed, *Metodologi Sejarah*, (Padang: UNP, 1999), h. 36

<sup>16</sup> Irfah A Shamad, *Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Hayfa Press, 2014), h. 103